



**PUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Ma'ruf
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asnawi Abdullah
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Asnawi Abdullah

Jakarta, Januari 2026
Pihak Pertama,



Anas Ma'ruf

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 4: Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	IT 4	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat**
	Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	ISS 26	Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan mencapai target Tahunan Pembangunan**
	024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan		
	Sasaran Program: Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IKP 26.2	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**
		IKP 26.4	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan**
	7969. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti	IKK 26.2.3	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II
		IKK 26.4.2	Persentase analisis kebijakan di bidang
			30%
			100%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
		Sistem Ketahanan Kesehatan		
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6	Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
		IKP 33.3	Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes**	
		IKP 33.4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
	6797. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKM 33.1.3	Nilai SAKIP Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan	83 (Nilai)
		IKD 33.1b.2	Reviu Regulasi: Rencana Prolegkes selesai di 2026	75%

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		bidang ketahanan kesehatan	
		IKD 33.2.2 Selesaikan perencanaan advokasi regulasi terkait TBC pada 14 April 2026	100%
		IKD 33.2.3 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan


Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Anggaran

Rp. 900.000.000,-

Rp. 900.000.000,-

Pihak Kedua,


Asnawi Abdullah

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,


Anas Ma'ruf